



IMPLEMENTASI PENGUATAN BELA NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Lamidi¹

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau¹

Penulis Korespondensi: lamidi.bpsdm@aol.com

Informasi Artikel

Article History;

Submitted: 01-08-2023

Accepted: 07-08-2023

Published: 09-08-2023

Kata Kunci;

Bela Negara; Masyarakat Sosial; Kebijakan Daerah.

Abstrak

Saat ini peerwujudan bela negara tidak lagi dalam wujud fisik perang dalam memaknai dan menjalankan fungsi bela negara, akan tetapi lebih pada penguatan bela negara pada aspek kekuatan sosial, ekonomi masyarakat sehingga masyarakat juga terlibat bela negara dalam konteks yang dimiliki masyarakat, terutama masyarakat yang ada diperbatasan. Upaya penguatan bela negara di daerah perbatasan ditopang oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kuat seperti akses informasi, kesejahteraan, partisipasi dalam penguatan ekonomi masyarakat dan negara serta menjaga kerukunan dan kebersamaan ditengah-tengah masyarakat. Desain penelitian dirancang dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan paradigma post *positivism*. Temuan yang berkaitan dengan situasi terkini tentang fenomena perilaku masyarakat terkait aksi bela negara di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan daerah secara khusus maupun pemerintahan dalam cakupan nasional karena fenomena ini telah digariskan menjadi prioritas pembangunan nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini memberdayakan 2 tahapan teknis penelitian yang saling menguatkan yakni wawancara mendalam dan *focus group discussion*. Penerapan penguatan aplikasi bela negara bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kepulauan Riau telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah terkait dengan baik. Namun demikian implementasi kebijakan penguatan bela negara tersebut masih diwarnai oleh adanya kinerja pencapaian yang belum optimal menggapai sasaran bela negara khususnya pada dimensi perwujudan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau kecil terluar wilayah perbatasan.

Abstract

Related to these conditions, this study intends Existing Conditions to convey that the findings of the study illustrate the need for human resource development which includes the development of knowledge, skills of citizen servants, and the development of attitudes as human resources as civil servants who uphold ethical guiding values but still reach the development of global competition. By reaching out to global competition, it is explained that the core value in efforts to develop practices and thoughts about ASN administration in the Riau Islands Provincial Government Environment. The research design was designed with a qualitative research approach conducted with the paradigm of post-positivism. Findings related to the current situation regarding the phenomenon of community behavior related to state defense actions in the border areas of Riau Islands Province are needed as consideration for local governments specifically and

Keyword;

State Defense; Citizen;
Regional Policy.

governments in the national scope because this phenomenon has been outlined as a national development priority in the last 10 years. Data and information collection techniques in this study empower 2 technical stages of research that reinforce each other, namely in-depth interviews and focus group discussions. The implementation of state defense strengthening for communities in the border area of Riau Islands has been successful for local governments. However, there is still room for improvement in achieving the policy's target. Specifically, the dimension of community welfare has not been evenly distributed across the various small islands beyond the border area.

PENDAHULUAN

Kondisi faktual aplikasi aksi bela negara bagi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi kekhawatiran yang serius. Dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektrum ancaman yang semakin kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman yang menimbulkan dampak yang sangat besar berupa krisis ekonomi yang mengarah pada resesi, pertumbuhan ekonomi menurun tajam, bahkan minus dialami banyak negara di dunia. Kelangkaan pangan, energi, dan lapangan kerja, banyaknya pengangguran, serta munculnya ketakutan dan ketidakpastian, kompleksitas persoalan serta ketidakjelasan atas situasi yang berkembang mewarnai kondisi sosial dan budaya masyarakat (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pertahanan Negara, 2022). Perkembangan lingkungan strategis pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman yang dapat memicu instabilitas kawasan diantaranya konflik Laut China Selatan yang secara umum berlangsung di sebagian besar wilayah perbatasan Propinsi Kepulauan Riau.

Diskusi ini menunjukkan urgensi pengembangan berbagai cara yang dilakukan agar masyarakat menyadari pentingnya kebangkitan nasional di berbagai sektor serta terciptanya kedamaian ditengah-tengah masyarakat dengan melakukan berbagai upaya deteksi dini konflik, karena konflik akan mendorong terjadi permusuhan diantara masyarakat, penguatan ekonomi masyarakat, pemenuhan kebutuhan jaringan komunikasi di seluruh Provinsi Kepri terutama bagi kepentingan pendidikan, penguatan peran lembaga kemasyarakatan, keagamaan dalam pemahaman nilai-nilai bela negara serta memberkan pemahaman kepada berbagai elemen dan lapisan masyarakat tentang pentingnya bela negara non militer yang harus dikuatkan ditengah-tengah masyarakat agar terhindar dari ancaman yang dapat memecah belah masyarakat.

Masyarakat wilayah perbatasan Kepulauan Riau jauh dari akses perhubungan, perekonomian dan pergerakan ekonomi langsung akan berdampak pada bagaimana kehidupan masyarakatnya seperti pemenuhan pangan (sembako), tempat tinggal yang layak, Kesehatan, Pendidikan semuanya berdampak pada aspek sosial masyarakat secara luas. Sehingga jika tidak menjadi perhatian pemerintah akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada negara yang dinilai abai atau tidak memperhatikan masyarakatnya, sementara masyarakat yang ada di wilayah perbatasan negara lain kehidupannya mencukupi dan diperhatikan.

Dalam dimensi kondisi perekonomian masyarakat wilayah perbatasan Kepulauan Riau, tercermin dari hasil perhitungan Indeks Kemahalan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menempati Indeks tertinggi ke 3 dan Natuna indeks ke 4 setelah Papua (<https://www.bps.go.id/indicator/4/128/1/indeks-kemahalan-konstruksi.html>). Hal ini disebabkan oleh aspek geografis kepulauan yang sangat jauh dari pusat sumber-sumber perekonomian dan pusat pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh sulitnya transportasi, artinya bahwa untuk penguatan bela negara di daerah perbatasan provinsi Kepri bukan saja memberikan pemahaman bela negara dalam bersikap sebagai warga negara kepada negara, tetapi ada upaya lain yang harus dilakukan pemerintah dalam menanamkan bela negara dari aspek lainnya terlebih dahulu yang meyakinkan masyarakat perbatasan bahwa pemerintah

sebagai pelaksana negara hadir memberikan jaminan kehidupan masyarakat secara utuh sehingga kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tetap terjaga masyarakat hidup dalam jaminan kecukupan sandang, pangan, Kesehatan dan pendidikannya sehingga cita-cita dari tujuan nasional menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dapat terwujud dengan demikian pemaknaan bela negara bukan saja pada aspek memperhatikan tumpah darah dan keutuhan NKRI dari kedaulatan fisik wilayah tetapi bagaimana penguatan bela negara hadir dari kesadaran masyarakat karena, karena masyarakat sudah memperoleh perhatian dari negara yang dikelola oleh pemerintah.

Kondisi kehidupan masyarakat yang ada diperbatasan Kepulauan Riau saat ini dibayangi oleh kondisi lingkungan masyarakat negara lain yang ada diperbatasan. As'ari (2017) menyatakan kehidupan masyarakat perbatasan Kepri di Natuna jauh tertinggal dari masyarakat perbatasan di Malaysia sehingga akses kebutuhan masyarakat lebih mudah di dapat dari negara tetangga. Ini menggambarkan bahwa berbagai upaya harus dilakukan pemerintah secara bersama-sama agar nasionalisme dan semangat bela negara masyarakat di perbatasan tidak terpengaruhi, maka perlu upaya masif pemerintah komprehensif penguatan ideologi kebangsaan dari aspek ekonomi, sosial, budaya, Kesehatan dan Pendidikan.

Komitmen pemerintah daerah akan suatu permasalahan dapat mencermati cerminan alokasi anggarannya pada bidang pembangunan terkait permasalahan tersebut (Yudharta, 2017). Demikian pula yang terwujud pada konteks membangun Kepulauan Riau. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat deskripsi postur Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah dengan sasaran penguatan pemahaman bela negara bagi masyarakat secara signifikan mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan pertahun 92, 87 Persen. Akan tetapi meski setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengupayakan peningkatan tersebut, dinamika konstelasi yang mengancam kedaulatan di wilayah perbatasan juga mengalami peningkatan situasi yang terus menjadi kekhawatiran bersama masyarakat. Pada saat yang bersamaan dinamika tersebut justru meningkat karena secara geografis, wilayah perbatasan Kepri dimaksud merupakan area yang sangat luas. Dalam urgensi inilah kajian bermaksud mengisi *gap* yang ada secara faktual saat ini, sehingga hasil kajian mampu mencapai kemanfaatan perbaikan pemikiran maupun praktek pemerintahan melalui kebijakan yang responsif.

Kehadiran kajian yang sistematis maupun ilmiah yang menempatkan fokus Bela Negara oleh masyarakat di wilayah perbatasan masih sangat terbatas kuantitasnya. Kajian sebelumnya dalam skala nasional justru didominasi oleh aspek pendidikan bela negara pada suasana atau kondisi pendidikan formal terukur sebagaimana Supardi (2020) yang difokuskan aplikasi bela negara pada lokus perguruan tinggi, atau yang memfokuskan pada aplikasi semangat bela negara secara umum sebagaimana Suwarno Widodo (2011) dan Gumelar (2020) yang membatasinya hanya pada kaum pemuda saja. Dalam skala internasional kajian aksi bela negara oleh masyarakat justru diarahkan kepada suatu situasi ancaman tertentu sebagaimana aksi terorisme, pelanggaran hak asasi manusia dan lainnya (United Nations Human Rights, 2014). Sedangkan fenomena yang terjadi di sebagian besar wilayah perbatasan Kepulauan Riau merujuk kepada ATHG yang demikian kompleks. Dengan demikian kehadiran hasil kajian ini nantinya secara strategis memiliki letak spesifik dan semakin memperkaya referensi baik secara akademis maupun praktis bagi semua pihak yang berkepentingan mengembangkan atau memperbaiki kondisi perwujudan bela negara oleh masyarakat Indonesia khususnya yang tersebar di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika lingkungan strategis daerah perbatasan akan membawa implikasi baik positif maupun negatif pada sisi lain secara bersamaan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional. Implikasi positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional, dalam hal ini perkembangan perdagangan antar negara sehingga dapat menghasilkan devisa negara (Ragimun et al., 2022). Lebih lanjut disampaikan penguatan perdagangan antar negara khususnya di daerah perbatasan membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Setiawan et al. (2017) Dalam

pandangannya bahwa yang perlu dipikirkan adalah kulturasi dan dampak domino dari perkembangan budaya luar kepada kehidupan sosial masyarakat termasuk cara berpikir kebangsaan.

Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa negara Asean secara ekonomi akan menguntungkan masyarakat perbatasan terutama dampak ekonomi dari perdagangan antar negara. Akan tetapi secara sosial yang tak terkontrol seperti dampak arus perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat terutama yang arus informasi dari luar lebih besar dibandingkan informasi dari dalam. Perbatasan Kepulauan Riau akan lebih banyak menerima informasi dari luar negeri dibandingkan dari dalam negeri, serta jika pengawasan yang lemah akan berdampak pada terjadi penyelundupan orang dan barang terutama Narkoba ini implikasi negatif menyebabkan meningkatkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat perbatasan dan negara. Sehingga penguatan nilai-nilai bela negara masyarakat perbatasan adalah membangun pola kepedulian untuk bekerjasama menjaga kedaulatan negara bukan saja dari aspek wilayah negara tetapi ancaman yang berimplikasi pada retensi masyarakat.

Lingkup strategis dibidang keamanan yang lebih luas tidak hanya membahas tentang perang antar bangsa, namun perkembangan isu dalam hubungan internasional, yang terjadi saat ini mendorong strategi menjadi bagian dari bagaimana sebuah negara dan daerah yang berada di perbatasan membuat strategi penguatan keamanan masyarakat yang lebih luas mengingat persoalan bangsa berada pada kekuatan masyarakatnya dalam konteks ini bagaimana penguatan bela nagera non militer sebagai bentuk kemampuan awal bela negara bagi masyarakat yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Semua kekuatan ini dipengaruhi oleh kebijakan politik, kebijakan luar negeri, persoalan kemanusiaan serta kondisi eksternal lainnya seperti Covid-19 yang berdampak pada eskalasi ekonomi dunia (Triyawan & Fendayanti, 2021).

Penanganan covid-19 adalah bagian dari upaya penguatan bangsa dalam bela negara dengan penguatan struktur sosial masyarakat membangun keadaran bersama untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang lebih luas. Nashir et al. (2021) dalam penelitiannya yang berfokus pada aspek Geopolitics, Geostrategy, and Strategy, menjelaskan bahwa konfigurasi geografi menjadi refleksi bagi para pengambil kebijakan untuk memanfaatkan peluang termasuk bagaimana kebijakan daerah memanfaatkan peluang strategis daerah sebagai kekutan yang bukan sekedar simbol tetapi bagaimana kebijakan daerah mengarahkan masyarakat pada tatanan dan implementasi dalam pemanfaatan kebijakan.. Sehingga bela negara sebagai kekuatan sosial masyarakat dan kekeuatan bagi bangsa dan negara dengan berbagai upaya yang dapat dilalukan oleh bangsa dan negara agan masyarakatnya menjadi kuat dan tidak rentan dipecah belah oleh berbagai isu yang menerpa bangsa Indonesia.

METODE

Desain penelitian dirancang dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan paradigma *post positivisme*. Paradigma post-positivisme ini dipilih karena penelitian tentang penguatan bela negara di Kepulauan Riau dipandang sebagai "*observed facts*" yang akan menghasilkan "*knowledge based on experience*", yaitu suatu konsep baru yang disusun berdasarkan temuan penelitian tentang pengembangan bela negara. Hal ini diperkuat oleh pendapat Akcam et al., (2019; Creswell, (2012), berpendapat terdapat dua pendekatan kualitatif yang dapat digunakan, tergantung pada kecanggihan filosofis pengamatannya. Satu pendekatan merujuk pada asumsi paradigma kualitatif dan memberikan contoh-contoh spesifik untuk menggambarkan asumsi paradigma kualitatif. Sejalan dengan pemikiran Creswel juga dikemukaakan pikiran Sugiyono (2019) menggambarkan bahwa penelitian sosial masyarakat yang menguji kondisi dinamis akan lebih cocok menggunakan paradigma penelitian kualitiatif karena akan lebih mudah dalam menggambarkan kondisi dilapangan berdasarkan fakta penelitian.

Pilihan desain dan pendekatan kualitatif yang menyatakan gambaran jelas fenomena kajian

dipandang sebagai keleluasaan untuk menghasilkan suatu atribusi pengetahuan baru. Temuan yang berkaitan dengan situasi terkini tentang fenomena perilaku masyarakat terkait aksi bela negara di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan daerah secara khusus maupun pemerintahan dalam cakupan nasional karena fenomena ini telah digariskan menjadi prioritas pembangunan nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (PRN Indonesia 2014 s.d 2024).

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini memberdayakan 2 tahapan teknis penelitian yang saling menguatkan. Adapun kedua teknik tersebut secara rinci dapat mencermati poin-poin berikut ini. (1) Wawancara secara mendalam yang dilakukan sebagai cara pengumpulan data primer dari para informan penelitian. Pedoman yang dipergunakan saat teknis wawancara dirancang untuk mengetahui kondisi terkini dan harapan masyarakat terhadap penguatan bela negara. Wawancara akan mengumpulkan serta mengkonfirmasi fenomena kajian terhadap informan kunci representasi masyarakat yang benar-benar memahami dan bersinggungan rutinitasnya pada area perbatasan di wilayah Kepulauan Riau. Selanjutnya (2) *Focus Group Discussion* bertujuan untuk menggali informasi tentang penguatan bela negara di Kawasan perbatasan melalui diskusi terbatas dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan penguatan bela negara seperti : Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Perbatasan, Biro Pemerintahan, Dinas ESDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT). Keberadaan teknik *focus group discussion* ini merupakan katalisator penghimpunan informasi penelitian melalui wawancara sebelumnya. Sehingga dihasilkan informasi dan data penelitian yang valid untuk mendukung penarikan kesimpulan dan rekomendasi kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum dalam penguatan bela negara di kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (*holistic*), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/ Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat,

a. Analisis Penerapan Penguatan Bela Negara di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.

Pembangunan dan program kebijakan penguatan bela negara di kawasan perbatasan secara spesifik dapat menggunakan berbagai macam skenario dan kebijakan guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengembangan dan implementasi nilai bela negara di berbagai aspek kehidupan. Namun pada dasarnya bahwa penguatan bela negara di wilayah Provinsi Kepulauan Riau harus mampu menuntaskan 3 (tiga) nilai besar penguatan bela negara di wilayah perbatasan. (1) Kesenjangan pembangunan, (2) Kesejahteraan, serta (3) Kerukunan. Kondisi permasalahan tersebut sangat sesuai dengan hasil wawancara, FGD, serta tujuan dari program yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam penguatan bela negara di kawasan perbatasan. Sehingga masalah nasionalisme tidak terlalu dikhatirkam mengingat masyarakat perbatasan memiliki nasionalisme dan sangat mencintai Indonesia, karena bertahun-tahun masyarakat perbatasan lebih banyak mendapat akses dari luar negeri, sehingga kedepan bagaimana penguatan nasionalisme dan bela negara dibidang ekonomi, kesejahteraan

dan aksesibilitas lebih menjadi perhatian.

Menghadapi dinamika perubahan lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin kompleks dan tidak pasti, maka aparaturnya dituntut memiliki integritas dan kualitas yang mumpuni. Dalam skala lokal, salah satu masalah yang perlu dituntaskan adalah mengenai kuantitas dan kualitas SDM di sektor publik, di mana keduanya merupakan permasalahan yang cukup dilematis. Dari segi kualitas, kondisi SDM sektor publik dapat dikatakan sangat heterogen yang disebabkan oleh berbagai alasan seperti sistem rekrutmen PNS yang masih lemah, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat yang menghasilkan lulusan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi masih sangat bervariasi kualitasnya, sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang belum mantap, serta sistem pembinaan karier yang juga belum mantap. Di samping itu, masih ada kendala lain yang menjadi hambatan dalam pengembangan SDM di sektor publik, yakni masih terbatasnya dana pemerintah untuk pembinaan dan pengembangan pegawai.

Untuk mewujudkan sosok aparatur yang mempunyai kualitas dan daya saing tinggi tersebut, maka beberapa aspek yang perlu dibina adalah pembinaan inisiatif, kreatifitas, kepercayaan terhadap diri sendiri, tanggung jawab, dinamika atau mobilitas, kemampuan menyesuaikan diri, kesiapan untuk menerima pengetahuan baru, sadar terhadap kualitas, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan bermusyawarah untuk mufakat, memiliki loyalitas terhadap organisasi, siap untuk melakukan pengambilan keputusan, memiliki pemahaman terhadap suatu sistem yang kompleks, memiliki kemampuan berkomunikasi, serta mempunyai semangat untuk bekerja untuk bekerja secara kelompok.

Untuk mengimplementasi kebijakan penguatan bela negara merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dengan sasaran tertentu dan dalam waktu tertentu. Dengan demikian yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah berupa tindakan-tindakan yang sah atau implementasi dalam suatu rencana untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Proses pencapaian penguatan bela negara dapat dimulai bila tujuan-tujuan kebijakan umum yang telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat dan anggaran telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan dalam konteks ini adalah penguatan bela negara.

Pencapaian kebijakan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme bagaimana menterjemahkan tujuan kebijakan kepada proses administrasi rutin dan Teknik organisasi, melainkan lebih jauh dari pada itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi, kelompok masyarakat sampai kepada golongan politik yang mungkin tidak menyetujui terhadap kebijakan dan tujuan yang sudah ditetapkan. Berbagai faktor tersebut terdapat dalam setiap lingkungan pemerintahan daerah yang senantiasa pula berinteraksi dengan lingkungan berbagai kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan sekitarnya. Dengan demikian, pencapaian penguatan bela negara tidak dipandang semata-mata sebagai tindakan teknik dan administrasi tetapi juga merupakan tindakan politik yang melibatkan berbagai *stakeholder* dengan kepentingan masing-masing.

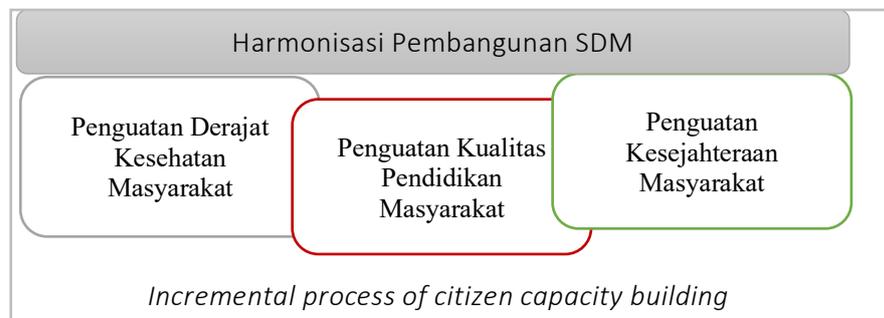
b. Faktor Strategis Keberhasilan Kebijakan Penguatan Bela Negara di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.

Fokus utama faktor yang menjadi perhatian khusus temuan kajian ini menyangkut faktor strategis yang diharapkan mampu meningkatkan aplikasi bela negara di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Tantangan pada masa mendatang akan terus mengalami perubahan baik itu dikarenakan berkembangnya strategi perekonomian maupun dinamika politik yang diberlakukan oleh negara-negara tetangga. Dengan demikian pemahaman maupun kapasitas menerapkan bela negara bagi masyarakat pada

wilayah perbatasan Negara esatuan Republik Indonesia khususnya pada lokasi kajian hendaknya juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Diskusi dalam temuan ini dikuatkan berdasarkan hasil *focus group discussion* yang telah menempatkan sapek sumber daya manusia sebagai faktor strategis utama. Penentuan ini dalam konteks membangun aplikasi bela negara di wilayah perbatasan Kepulauan Riau karena sumber daya manusia dipandang sebagai fondasi penting yang menopang kualitas dan kapabilitas upaya bela negara di lokasi strategis nasional tersebut. Hal ini juga senada dengan makna bahwa bela negara merujuk kepada psikis (mental) personal masyarakat yang memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional (Retno Susanti, 2019). Juga secara formal memotivasi perwujudan bela negara juga sebenarnya mengacu kepada kewajiban anggota masyarakat yang diatur dalam konsepsi pertahanan negara (Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, 2002). Dengan demikian hasil temuan maupun diskusi terbatas bersama ahli memiliki pandangan yang sama tentang penguatan *good citizen practice* melalui penguatan pembangunan aspek sumber daya manusia bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

Banyak pemikiran yang menyepakati bahwa kesejahteraan masyarakat, kualitas kesehatan serda pencapaian *mindset* pembangunan yang didukung oleh kualitas pendidikan masyarakat yang memadai adalah kesatuan dimensi yang menjadi cerminan kualitas SDM masyarakat saat ini. Anggapan ini dipandang memiliki relevansi yang sangat baik bagi sustainibilitas kebijakan penguatan bela negara khususnya di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga cita-cita mewujudkan format aplikasi Bela negara berupa rutinitas sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 mampu diaplikasikan secara nyata oleh masyarakat di wilayah perbatasan Kepulauan Riau. Pengertian ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktifitas bela negara. Secara sederhana skema pengembangan ataupun peningkatan implementasi kebijakan penguatan aksi bela negara masyarakat di wilayah perbatasan tersebut dapat mencermati deskripsi bagan berikut ini.



Gambar 1. Harmonisasi Kebijakan Penguatan Bela Negara Masyarakat Wilayah Perbatasan Kepulauan Riau.

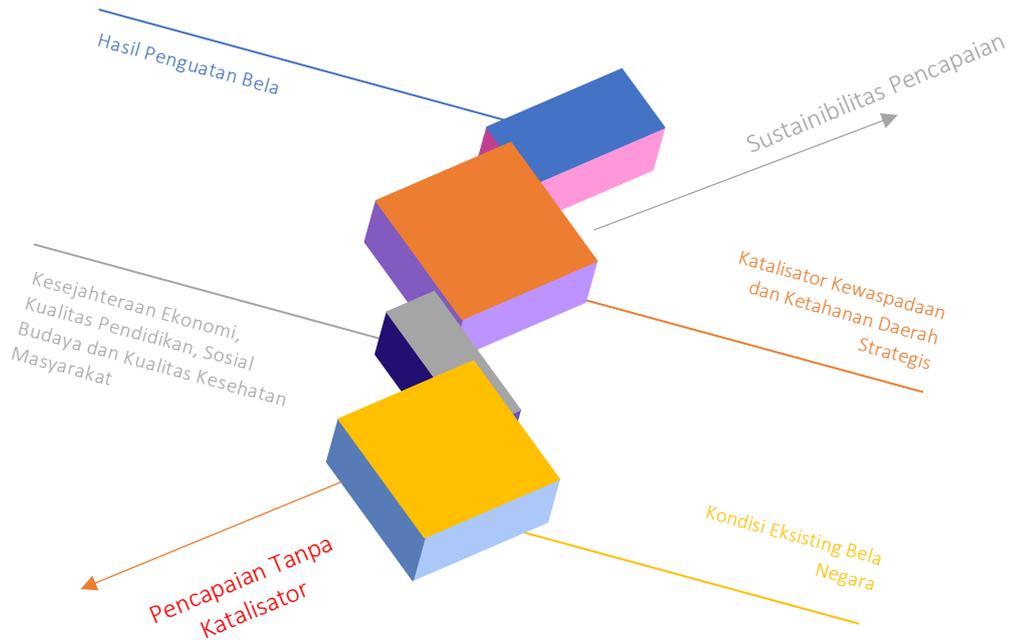
Sumber : Kompilasi Diskusi dan Temuan Kajian Penulis, 2023.

Bela negara dalam hasil pengkajian ini telah menempatkan pemikiran yang integratif antara upaya masyarakat sebagai subjek utama pembangunannya maupun pemerintah daerah yang menjadi akselerator pembangunan aksi bela negara yang mampu dilaksanakan oleh masyarakat khususnya pada wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan

Riau. Dengan asumsi dukungan aspek lingkungan pembangunan daerah yang kondusif, dibutuhkan harmonisasi kebijakan penguatan penerapan bela negara oleh masyarakat yang berdomnisi pada pulau- pulau kecil wilayah perbatasan Kepulauan Riau. Harmonisasi kebijakan penguatan bela negara yang dimaksudkan yakni merujuk kepada hasil pengkajian yakni faktor strategis penguatan Sumber Daya Manusia yang tercermin dari implementasi kebijakan pembangunan kualitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini menyangkut subjek utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah kabupaten/ kota terkait, serta pemerintah pusat. Secara bertahap (*incrementally*) keadaan perwujudan bela negara masyarakat di wilayah perbatasan mapu meningkat secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga aksi bela negara benar- benar secara utuh mampu meningkatkan kewaspadaan dan pertahanan negara.

c. Sinergitas Faktor Strategis Penguatan Bela Negara di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau

Atas dasar diskusi dan temuan penelitian pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa penguatan aspek sumber daya manusia melalui penguatan faktor penguatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan masyarakat dan penguatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi kekhawatiran bersama. Baik hasil pengumpulan data kajian melalui wawancara mendalam dan data sekunder juga diketahui adanya tuntutan untuk meningkatkan kewaspadaan daerah di tengah-tengah kondisi saat ini yang sangat dinamis dan sulit diperkirakan. Oleh karena demikian, menyangkut upaya penguatan penerapan bela negara di wilayah perbatasan Kepulauan, tidak dapat dipisahkan dengan berbagai faktor penting yang berkaitan seperti; Kualitas Pendidikan Masyarakat, Kesejahteraan perekonomian masyarakat, serta masyarakat wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil bahasan sebelumnya mendeskripsikan diperlukan adanya suatu integrasi yang harmonis antara kewaspadaan terhadap lingkungan yang mempengaruhi (*enviroment*) kebijakan penguatan penerapan bela negara di wilayah perbatasan Kepulauan Riau dengan kondisi factual ekonomi kesejahteraan masyarakat, pendidikan sosial budaya maupun kondisi kesehatan masyarakat wilayah perbatasan yang berkualitas. Ruang kosong inilah yang secara stategis menempatkan pemerintahan daerah seperti Provinsi Kepulauan Riau untuk segera melakukan pengisian peran melalui integrase antar dimensi/ faktor yang berkaitan di lapangan tersebut. Secara sederhana dapat memperhatikan pola hubungan seperti berikut ini.



Gambar 2. Integrasi Faktor Strategis Penguatan Bela Negara Masyarakat Wilayah Perbatasan Kepulauan Riau

Sumber : Hasil Telaah Diskusi dan Temuan Kajian Penulis, 2023.

Capaian hasil atau kinerja penguatan bela negara tentu membutuhkan format penguatan Kewaspadaan dan ketahanan pada daerah strategis sebagaimana keadaannya di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Ketahanan dan kewaspadaan ini secara integrative merupakan bagian penguat (katalisator) yang secara nyata tidak dapat dipisah-pisahkan pada rutinitas kehidupan masyarakat (Suryatni, 2019). Hal ini dikarenakan sebagai konsekuensi terhadap kondisi pembangunan dengan dilemma dan tantangannya yang senantiasa berjalan secara dinamis seiring perkembangan/ peningkatan kebutuhan masyarakat akan terobosan baru pemerintah daerah khususnya dalam hal proses pemenuhan kebutuhan pendidikan sosial budaya yang berkualitas, kesehatan masyarakat serta fundamental kesejahteraan ekonomi masyarakat (Mallén-Broch et al., 2023) khususnya di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.

Arah pencapaian penguatan bela negara merupakan visi yang sangat penting dalam upaya menguatkan bela negara di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Selalu terdapat dua kemungkinan terkait peluang daerah mewujudkan percepatan penerapan bela negara pada wilayah strategis dimaksud. Kemungkinan arah penurunan yang tentunya memiliki kecenderungan negatif dan melemahkan, maupun pencapaian positif yakni kinerja yang selalu mengalami peningkatan secara berkelanjutan (bagian kanan pada gambar). Untuk itu kehadiran penguat ataupun katalisator berupa integrasi faktor kewaspadaan dan ketahanan daerah strategis menjadi penopang pada terobosan daerah sebagaimana upaya membangun di wilayah perbatasan yang diperankan saat ini oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penguatan seperti ini dipandang sebagai suatu sikap yang sangat strategis mengingat bahwa pengejawantahan bela negara merupakan cerminan perilaku masyarakat (Lin et al., 2016) yang secara rutin melaksanakan pola interaksi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bela negara dan ketahanan negara memiliki hubungan yang signifikan dalam mewujudkan dan mempertahankan ketahanan negara seperti yang tersirat dan tersurat dalam alinea ke IV Pembukaan UUD NRI 1945. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pengaturan, penyelegara bernegara dengan berlandaskan ajaran AstaGatra.

Oleh karena itu, konsepsi ketahanan nasional merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan nasional, sehingga geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, dengan demikian twawasan nusantara tidak menganut teori ekspansionisme, kekerasan, dan okupasi. Untuk mewujudkannya diperlukan peran aktif setiap warga negara, tanpa terkecuali, dalam ikut pembelaan negara sesuai dengan keahlian masing-masing yang pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi negara.

SIMPULAN

Pengkajian tentang upaya penguatan perwujudan bela negara bagi masyarakat di wilayah perbatasan memiliki urgebsi yang cukup beralasan. Disamping secara kuantitas masih relatif jarang, juga eksistensi tantangan maupun ancaman dari luar wilayah NKRI justru berkembang secara dinamis. Berdasarkan informasi maupun temuan pengkajian ini, dapat menyimpulkan beberapa hal berikut. (1) Penerapan penguatan aplikasi bela negara bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kepulauan Riau telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah terkait dengan baik. Namun demikian implementasi kebijakan penguatan bela negara tersebut masih diwarnai oleh adanya kinerja pencapaian yang belum optimal menggapai sasaran bela negara khususnya pada dimensi perwujudan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau kecil terluar wilayah perbatasan; (2) Penerapan bela negara di perbatasan Kepulauan Riau lebih dititikberatkan kepada kesejahteraan perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, transportasi dan jaringan informasi; (3) Pengkajian telah mengkonfirmasi bahwa faktor strategis yang memerlukan pengembangan dan peningkatan lebih lanjut berdasarkan analisis temuan maupun diskusi dalam focus group discussion adalah faktor sumber daya manusia yang merupakan cerminan utama kekuatan masyarakat di wilayah perbatasan untuk menerapkan nilai-nilai penting bela negara dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akcam, B. K., Guney, S., & Cresswell, A. M. (2019). Research Design and Major Issues in Developing Dynamic Theories by Secondary Analysis of Qualitative Data. *Systems*, 7(3), 40. <https://doi.org/10.3390/systems7030040>
- As'ari, H. (2017). Policy Implementation of the Outer Islands Management at Kepulauan Riau Province. *Public Policy and Administration Research*, 7(3), 40–47.
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. In *Educational Research* (4th Editio). University of Nebraska.
- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 23 (2002).
- Gumelar, R. (2020). *Peran Masyarakat, pemuda dalam Bela Negara*. 1–9.
- Nashir, A. K., Komeini, Y., & Rosdiana, H. (2021). Strategic Environment, Strategist, and Strategy. *Jurnal Global & Strategis*, 15(1), 103. <https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.103-126>
- Ragimun, R., Handoko, R., Rosjadi, I., Mutaqin, M., & Yasin, A. (2022). Kinerja Perdagangan Indonesia-Singapura Dan Malaysia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 28–45. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1540>
- PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2022, 1 (2022).
- Retno Susanti. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan*. 10.
- Setiawan, I. M. B., Agung, I., Yufriawati, & Irmawati, A. (2017). *Akulturası Kebudayaan Pada Masyarakat di Wilayah 3T: Peran PKBM Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat*.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta.
- Supardi, S. (2020). Menciptakan Semangat Bela Negara Dalam Lingkungan Perguruan Tinggi. *Anterior Jurnal*, 19(2), 50–54. <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1506>
- Suwarno Widodo. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(1), 21. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/572>
- Triyawan, A., & Fendayanti, Z. E. U. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi. *Forum Ekonomi*, 23(2), 223–230. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/8082>
- United Nations Human Rights. (2014). *CIVIL SOCIETY SPACE AND THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS SYSTEM A Practical Guide for Civil Society*. https://www.ohchr.org/sites/default/files/CS_space_UNHRSystem_Guide_0.pdf
- Yudharta, I. P. D. (2017). Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Anggaran Pro Publik Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 8(2).